



PROCEEDING

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER

“ISLAM NUSANTARA: MENEGUHKAN MODERATISME DAN MENGIKIS EKSTRIMISME DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA”

**Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (P2KB)
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)
Universitas Negeri Malang (UM)**



**Aula Utama Rektorat Universitas Negeri Malang
Sabtu, 13 Februari 2016**



PROCEEDING

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER

*“ISLAM NUSANTARA: MENEGUHKAN MODERATISME
DAN MENGIKIS EKSTRIMISME DALAM
KEHIDUPAN BERAGAMA”*

**Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (P2KB)
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)**

Prosiding

“Islam Nusantara: Meneguhkan Moderatisme dan Mengikis Ekstrimisme dalam Kehidupan Beragama”

Penyunting dan Editor Ahli:

Yusuf Hanafi

Tim Editing:

H. Sulton
Eddy Sutadji
Faris Khoirul Anam
Moh. Rohmanan
Moh. Fauzan

Cover Design:

Rudi Rahayu Widodo

Lay Out:

Moh. Bakir
Adi Mulyo

ISBN:

978-602-17187-4-2

KATA PENGANTAR

Istilah Islam Nusantara menemukan momentum popularitasnya sejak digulirkan sebagai istilah dan tema kunci dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang, Jawa Timur, awal Agustus 2015 lalu. Meskipun lahir dari rahim NU dan akan dibesarkan di atas pangkuannya, isu ini tidak hanya dimonopoli kalangan warga NU (Nahdliyin), namun telah menjelma menjadi isu nasional yang diperbincangkan secara luas.

Keterkenalan istilah Islam Nusantara paralel dengan pro dan kontra mengenainya. Satu pihak menerima Islam Nusantara sebagai suatu kajian akademik, budaya, dan peradaban luhur Indonesia yang moderat dan toleran. Sementara pihak lain menolak karena Islam Nusantara disinyalir sebagai “agama baru”, gerbong liberalisme, gerakan anti-Arab, menusantarakan Islam, atau proyek yang berupaya mereduksi ajaran Islam.

Pro dan kontra tersebut berpotensi terjadi karena terdapat perbedaan persepsi, identifikasi, dan definisi istilah Islam Nusantara antar elit Muslim di Indonesia. Selain itu, juga disebabkan adanya kekhawatiran dari pihak kontra atas pemanfaatan istilah Islam Nusantara sebagai gerbong liberalisasi agama, kemusyrikan, Kejawen, atau dimanfaatkan kelompok Syi’ah, dan sebagainya. Oleh karena itu, terma Islam Nusantara membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak yang setuju sekaligus pihak yang menentangnya.

Selanjutnya, hasil tersebut disosialisasikan dengan baik di tengah masyarakat, termasuk organisasi-organisasi massa Islam, sehingga tidak terjadi polemik berkepanjangan dalam menyikapi istilah Islam Nusantara. Dengan bahasa lain, ke depannya istilah Islam Nusantara tidak menjadi “bola liar” yang menggelinding ke sana kemari tanpa arah, multitafsir, atau dimanfaatkan pihak-pihak yang memiliki tujuan berbeda dengan komunitas yang memunculkan gagasan tersebut.

Padahal sejatinya, Islam Nusantara mengusung misi luhur, yakni mengarusutamakan (*mainstreaming*) wacana dan aksi keagamaan yang moderat, sekaligus mengikis ekstrimisme dalam kehidupan beragama di Tanah Air, khususnya di tengah serbuan ideologi-ideologi keagamaan transnasional radikal yang mewabah belakangan ini. Risalah ini pula yang selama ini selalu diperjuangkan oleh Universitas Negeri Malang (UM) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terdepan di Kota Malang, dan Nahdlatul Ulama (NU) yang *notabene* merupakan organisasi kemasyarakatan dengan massa terbesar di Indonesia.

Menimbang perlunya rumusan konsep yang jelas tentang gagasan ini sekaligus mendiseminasikannya ke ruang publik, Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (P2KB), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), Universitas Negeri Malang menyelenggarakan Seminar Nasional dan *call for paper* tentang Islam Nusantara, bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

Kegiatan seminar nasional dan *call for paper* ini diawali dengan sidang pleno yang menghadirkan tiga pemateri kunci, yakni Prof. Dr.

Hariyono, M.Pd. (Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Negeri Malang) yang mencoba memahami dan mengalisis Islam Nusantara dalam Konteks Keindonesiaan (Sosial-Historis) pada sesi I. Pada sesi pleno II, dihadirkan dua pemateri kunci sekaligus, yakni KH. Miftahul Achyar (Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) yang mewakili pihak yang mengusung sekaligus mendukung gagasan Islam Nusantara, dan KH. Muhammad Najih Maimoen (Pengasuh Ribath Darus Shahihayn Ponpes al-Anwar Rembang Jawa Timur) yang merepresentasikan pihak yang kontra terhadap gagasan Islam Nusantara.

Selepas rehat siang, peserta membagi diri dalam 4 (empat) ruang. Aula Utama Rektorat digunakan untuk kegiatan *Bahtsul Masa'il* tentang Islam Nusantara, dan tiga ruang lainnya (Ruang sidang senat UM, Ruang Rapat Kemahasiswaan, dan Ruang Rapat BAKPIK) digunakan untuk sidang paralel—di mana 34 penyaji mempresentasikan paper yang tulis seputar isu Islam Nusantara. Isu-isu yang dimaksud itu adalah: (1) Islam Nusantara: Sejarah Kemunculan dan Kontroversinya; (2) Islam Nusantara dalam Perspektif Penggagas dan Pengusungnya; (3) Tudingan terhadap Islam Nusantara sebagai gerbong liberalisasi agama, kemusyrikan, Kejawen, Syiah, dan gerakan anti-Arab; (4) Urgensi Islam Nusantara dalam Konteks Keindonesiaan (Sosial-Historis); (5) Islam Nusantara, Ikhtiar Mengarusutamakan Ideologi Keagamaan yang Moderat dan Toleran; dan (6) Membedah Islam Nusantara Melalui Kajian Kitab-Kitab Klasik dan Kontemporer.

Meski ada kekurangan di sana-sini, secara keseluruhan kegiatan Seminar Nasional, *Call fo Paper* dan *Bahtsul Masa'il* yang mengangkat tema “*Islam Nusantara: Meneguhkan Moderatisme dan Mengikis Ekstrimisme dalam Kehidupan Beragama*” ini berlangsung lancar dan sukses. Oleh karena itu, melalui prakata prosiding ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan seminar nasional ini, baik sebagai panitia, pemakalah, peserta maupun sebagai tim editor prosiding ini. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran pimpinan UM, keluarga besar LP3, dan segenap mitra yang bekerja dengan keras, cerdas, dan ikhlas. Mereka itu adalah PWNU Jawa Timur, PW LBM NU Jawa Timur, dan PCNU Kota Malang.

Akhirnya, semoga prosiding ini bermanfaat bagi para dosen, guru, mahasiswa, peneliti, agamawan, dan semua pihak yang membutuhkan-Nya. Dan, semoga kehidupan beragama di Tanah Air di masa-masa yang akan datang semakin baik dan kondusif sebagaimana dicita-citakan oleh para penggagas dan pengusung Islam Nusantara.

Malang, 09 Februari 2016
Ketua Panitia

Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag., M.Fil.I.
Kepala P2KB LP3 UM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

<i>Islam Nusantara dalam Perspektif Mabadi' 'Asyrah</i>	01
Faris Khoirul Anam (Universitas Negeri Malang)	
<i>Menyemai Gagasan Islam Nusantara di Dunia Pendidikan Pesantren Melalui Culture of Peace Education</i>	18
Yusuf Hanafi (Universitas Negeri Malang)	
<i>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Bingkai Islam Nusantara</i>	29
Moch. Khoirul Anwar (Universitas Negeri Surabaya)	
<i>Islam Nusantara: Perspektif Penggagas dan Pengusungnya</i>	38
Muhammad Sulton Fatoni (Universitas Nahdlatul Ulama - UNU Jakarta)	
<i>Pemikiran Fiqih Nusantara KH. Sholeh Darat: Telaah Kitab Majmu'at Al-Syari'at Al-Kafiyat Li Al-'Awam Karya KH. Sholeh Darat</i>	47
Fathur Rohman (Universitas Islam NU Jepara)	
<i>Islam Nusantara di Dunia Maya: Studi Kasus Gerakan Nasional "Ayo Mondok"</i>	61
Abdulloh Hamid (UIN Sunan Ampel Surabaya)	
<i>Satu Islam dengan Ragam Pelabelannya</i>	81
Hazbini, dkk (Universitas Padjadjaran Bandung)	
<i>Ancangan Strategi Pembaharuan Budaya dalam Konteks Islam Nusantara</i>	85
Pudji Pratitis Wismantara (UIN Maliki Malang)	
<i>Urgensi Islam Nusantara dalam Menangkal Radikalisasi Islam dan Paham Anti Pancasila</i>	100
Moh. Abdur Rouf Hanifuddin (UIN Maliki Malang)	
<i>Memahami Diskursus Kontemporer Aktivitas Peribadatan Melalui Local Genius Education Sebagai Upaya Menangkal Gerakan Transnasional Radikal dan Disintegrasi Bangsa</i>	107
M. Alifudin Ikhsan (Universitas Negeri Malang)	
<i>Membumikan Islam Nusantara - Rahmatal lil 'Alamain Sebagai Upaya Pemersatu Bangsa dan Filter Aliran Sesat yang Memecah Belah NKRI</i>	114
Khozinatus Sadah, dkk (PPSP Al- Ishlahiyah)	

<i>Membentuk Kesalehan Global Berbasis Internalisasi Nilai Budaya Aswaja</i>	
Muhammad Natsir, dkk. (Universitas Islam NU JEPARA)	122
<i>Islam Nusantara: Agama dan Politik</i>	
Rizal Mubit (IAIN Tulungagung)	140
<i>Ekstremisme dalam Islam dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Generasi Muda</i>	
Kasuwi Saiban (Universitas Merdeka Malang)	151
<i>Penanaman Nilai –Nilai Islam Nusantara Melalui Pengajaran Reading di Perguruan Tinggi</i>	
Santi Andriyani (Universitas Islam NU Jepara)	160
<i>Islam Akulturatif: Potret Islam-Hindu Bali dalam Pergumulan Budaya Lokal</i>	
Kunawi Basyir (UIN Sunan Ampel Surabaya)	179
<i>Menemukan Makna Agama dalam Kehidupan Sosial</i>	
Miftahur Rohman (MTs Negeri Balen Bojonegoro)	190
<i>Ideologi Keagamaan Yang Moderat dan Toleran dalam Perspektif Normatif-Historis-Yuridis</i>	
Rosidin (Universitas Islam Lamongan)	199
<i>Upaya Dearabisasi dan Objektivasi Islam Antroposentis dalam Gagasan Islam Nusantara Melalui Analisis Konsep Ta’assub dalam Memperkuat Identitas Keindonesiaan</i>	
Masykur Rozi (UIN Walisongo Semarang)	212
<i>Islam Nusantara: Sejarah, Perkembangan, dan Kontroversinya</i>	
Imron Arifin (Universitas Negeri Malang)	227
<i>Usaha-Usaha UIN Maliki Malang dalam Merealisasikan Islam Rahmatan lil Alamin</i>	
Samsul Ma’arif (UIN Maliki Malang)	241
<i>Islam Jawa dalam Kajian Historiografi Britania Raya Awal</i>	
Daya Negri Wijaya (Universitas Negeri Malang)	253
<i>Hubungan Islam Tionghoa dan Islam Nusantara</i>	
Choirul Mahfud (ITS Surabaya)	265
<i>Dekonstruksi Epistemologi Filsafat Ilmu tentang Toleransi Umat Beragama di Indonesia: Sumbangsih Ide untuk Islam Nusantara</i>	
Sokhibul Ansor (Universitas Negeri Malang)	274
<i>Islam Nusantara antara Harapan dan Realita: Studi Responsif Islam Nusantara terhadap Problematika Umat Islam</i>	
Fajar Nugroho (Universitas 17 Agt. 1945 Banyuwangi)	281

<i>Perumusan Indeks Kota Santri</i>	302
Siti Kholifah, dkk (Universitas Brawijaya)	
<i>Islam Nusantara: Moderatisme dan Desakralisasi Beragama di Indonesia</i>	321
Abdul Aziz Muslimin (Universitas Muhammadiyah Makassar)	
<i>Quo Vadis Islam Nusantara</i>	330
Muhammad Jafar Shodiq (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	
<i>Membedah Islam Nusantara (Studi Analisis Pendekatan dan Metodologi Perspektif at-Turats al-Islāmi)</i>	338
Yulianto (STAI Ma'had Aly al-Hikam Malang)	
<i>Transformasi Tasawuf dan Identitas Islam Nusantara: Analisis Sosio-Historis</i>	355
Wildan Imaduddin Muhammad (PP Mahasiswa LSQ Ar-Rohmah Yogyakarta)	
<i>Negara dan Penguatan Islam Moderat Melalui Pendidikan: Studi Komparatif Lintas Negara</i>	370
Achmad Sultoni (Universitas Negeri Malang)	
<i>Mengembangkan Sikap Beragama yang Moderat dan Toleran dalam Konteks Sosial-Budaya Nusantara</i>	382
Muhammad Turhan Yani (Universitas Negeri Surabaya)	
<i>Pengarusutamaan Nilai-Nilai Keagamaan Islam yang Moderat dalam Kehidupan Beragama dan Implikasi Pembelajarannya pada Lembaga Pendidikan</i>	388
Lilik Nur Kholidah (Universitas Negeri Malang)	
<i>Islam Nusantara: Dialektika Normativitas dan Lokalitas Indonesia</i>	396
Yusuf Suharto (Aswaja Center NU Jombang)	

MENGEMBANGKAN SIKAP BERAGAMA YANG MODERAT DAN TOLERAN DALAM KONTEKS SOSIAL-BUDAYA NUSANTARA

Oleh Muhammad Turhan Yani
(Universitas Negeri Surabaya,
e-mail: mturhanyani@yaho.co.id)

Abstrak

Bagi sebagian orang tidak mudah untuk dapat menerima perbedaan dalam kehidupan yang dijalani, apalagi perbedaan dalam hal ideologi keyakinan, hal ini didasarkan pada fakta bahwa ketidakharmonisan dalam konteks sosial-budaya selama ini ternyata salah satunya karena sebagian orang belum mampu mengembangkan sikap toleran pada orang lain, sehingga yang terjadi adalah kebencian bahkan konflik. Namun demikian bagi sebagian orang yang telah mampu mengembangkan sikap moderat dan toleran dalam beragama akan dengan mudah menerima realitas kemajemukan (pluralitas) karena kemajemukan sesungguhnya adalah *sunnatullah* (kehendak Allah) di samping juga fakta *historis-empiris*, khususnya dalam konteks sosial-budaya di Nusantara. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dielaborasi lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

Kata-Kata Kunci:

Pengembangan, sikap beragama, moderat, toleran, sosial-budaya

Pendahuluan

Sesungguhnya dalam agama (Islam) realitas kemajemukan (pluralitas) merupakan kehendak Allah yang tidak dapat ditolak oleh manusia, oleh karenanya bagi siapa saja yang tidak dapat menerima kemajemukan sesungguhnya sama dengan menolak kehendak Allah. Di samping itu kemajemukan juga merupakan fakta *historis-empiris* dalam konteks sosial-budaya Nusantara yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa.

Secara empirik sudah menjadi kenyataan bahwa konsekuensi dari kemajemukan akan melahirkan banyak perbedaan. Oleh karena itu dalam menyikapi realitas yang demikian dan sebagai upaya membangun harmonisasi kehidupan sosial-budaya, khususnya di Wilayah

Nusantara ini, maka pengembangan sikap beragama yang moderat dan toleran sangat penting dilestarikan. Sikap yang demikian diyakini akan dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan berjiwa besar karena dapat mengelola kemajemukan dalam berbagai aspeknya.

Pluralitas dalam Perspektif Islam

Pluralitas hendaknya dipahami sebagai sesuatu yang didasari oleh keutamaan dan kekhasan sendiri. Pluralitas tidak dapat diidentikkan dengan situasi cerai-berai, perpecahan, permusuhan, berhadapan, dan pertikaian antar pemeluk agama, antar partai politik peserta pemilu dan sebagainya, karena hal yang demikian itu tidak mempunyai tali persatuan dan

persaudaraan yang mengikat semua pihak.

Pluralitas agama merupakan fakta *historis-empiris*, bahkan Nurcholish Madjid menyebutnya sebagai fakta teologis, yakni Tuhan memang sengaja menjadikan manusia ke dalam pelbagai bangsa dan suku, bahkan agama supaya saling mengenal di antara sesama. Masyarakat Indonesia khususnya, dan masyarakat beragama pada umumnya masih sering belum dewasa dalam menyikapi “problem” pluralisme. Di satu sisi agama memang memiliki daya rekat yang sangat kuat dibandingkan dengan ikatan etnis (suku), ras, bahasa atau yang lain, dan agama juga sangat efektif sebagai pembentuk identitas suatu kelompok. Akan tetapi di sisi lain, agama juga dapat menjadi sumber pemicu yang sangat ampuh dan sensitif munculnya konflik dalam kehidupan sosial. Sebagai suatu contoh pada awal-awal reformasi, mengapa tragedi Sambas tidak terlalu besar efeknya dibandingkan dengan tragedi Ambon ? Di antara jawabannya karena Ambon memakai isu agama yang akhirnya dapat menggugah umat beragama tertentu untuk ikut terpanggil “membantu” saudara seagamanya, tidak demikian besar efeknya dengan kasus Sambas yang isunya bukan isu agama (Yani, 2006:29).

Secara normatif, banyak sekali ayat alquran yang menjelaskan tentang realitas kemajemukan (pluralitas), diantaranya dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya: *“Wahai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal...”*. Menyikapi realitas yang demikian

maka kewajiban bagi umat beragama adalah menghadirkan rasa tenang, damai, dan kasih-sayang yang merupakan misi suci agama, atau yang dalam Islam adalah *Rahmatan lil ‘Alamin*.

Dalam kaitan dengan paham pluralitas, Alwi Shihab (1999) mengutip pendapat seorang teolog kenamaan Barat, yang mengatakan perlu dikembangkan teologi inklusif-pluralis dalam kehidupan umat beragama yang pluralis, bukan teologi eksklusif. Dalam konteks sosial-budaya di Nusantara teologi yang demikian sangat cocok karena secara *historis-empiris* Nusantara merupakan wilayah yang sangat majemuk atau plural dalam berbagai aspeknya, baik etnik, agama, kultur, maupun aspek-aspek lainnya.

Selanjutnya, menurut Imarah (1999), dalam realitas kehidupan beragama dan berpolitik, pluralitas memiliki dua sisi sifat yaitu moderat atau adil dan ekstrim. Sisi moderat atau adil akan dapat menjaga dan memelihara hubungan dengan baik di antara kemajemukan dan perbedaan yang ada, baik kemajemukan dan perbedaan dalam agama maupun partai politik, misalnya kesadaran pemeluk Islam untuk menghormati pemeluk agama lain (non Islam) dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. Demikian pula pemeluk agama lain menghormati umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Dalam masalah politik pun, semua warga negara tanpa memandang latar belakang agama dan partai politik, sama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menghormati kemajemukan dan perbedaan dalam perspektif satu bingkai persatuan dan kesatuan.

Dalam teks-teks agama, perbedaan yang sifatnya prinsipil

pun seperti masalah keyakinan agama harus dihormati yang dalam agama (Islam) dinyatakan "*lakum dinukum wa liyadin*". Artinya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku (QS. al-Kafirun : 6). Ini merupakan batasan yang jelas dalam masalah keyakinan, akan tetapi tetap dalam koridor saling menghormati di antara keyakinan-keyakinan agama yang berbeda, apalagi menghargai perbedaan dalam hal yang sifatnya tidak terlalu prinsipil.

Kalau toleransi dalam keyakinan agama dikembangkan ke dalam masalah politik, maka akan menjadi suatu pernyataan dan sikap "*bagimu pilihan politikmu dan bagiku pilihan politikku*". Konsekuensi dari sikap ini sangat bermakna diterapkan dalam politik, khususnya tataran politik praktis, sehingga akan dapat mengeliminir terjadinya politik uang (*money politic*) dan perpecahan. Ini artinya sikap toleransi karena berbeda latar belakang, baik agama maupun partai politik menjadi sesuatu yang sangat penting agar tidak terjadi suatu pertentangan.

Dalam mendukung dan menentukan pilihan pada partai politik tertentu dapat bercermin pada ketegasan agama dalam bersikap. Dalam agama diajarkan bahwa tidak diperkenankan seseorang memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan agamanya yang dalam Islam dinyatakan "*La ikraha fiddin*" (tidak ada paksaan dalam memeluk agama). Demikian pula dalam berpolitik, ketegasan sikap tidak memaksa seseorang untuk mengikuti kemauan dan pilihan politiknya merupakan bagian dari toleransi sebagaimana yang diajarkan oleh agama.

Lebih lanjut dalam konteks pluralitas agama, batasan keyakinan tersebut tidak berarti umat Islam

membatasi diri atau tidak boleh berinteraksi dengan pemeluk agama lain dalam masalah selain keyakinan (ritual ibadah). Akan tetapi selama bukan persoalan ritual ibadah, seperti berinteraksi dalam hal ekonomi, politik, sosial-kemasyarakatan, membantu korban bencana dan sebagainya, semua umat beragama mempunyai kewajiban yang sama untuk menjalin hubungan dengan baik. Dalam Islam istilah ini sering disebut dengan "*muamalah*" (berinteraksi dengan sesama manusia dalam hal ekonomi, politik, sosial-kemasyarakatan dan sebagainya).

Sementara sisi ekstrem pluralitas adalah sikap ekstrem represif dan otoriter. Sisi ini menafikan atau mengingkari kekhasan yang ada dalam perbedaan-perbedaan. Dalam konteks agama, sisi ekstrem ini ditunjukkan dengan cara memaksa seseorang untuk mengikuti keyakinan agama tertentu sebagai keyakinan yang paling benar. Memang setiap pemeluk agama mempunyai keyakinan bahwa agama yang diyakini merupakan agama atau keyakinan yang paling benar, akan tetapi bukan berarti seseorang boleh menyatakan bahwa keyakinan agama lain salah.

Pada sisi lain dalam konteks politik, sebagian masyarakat Indonesia juga masih belum terbiasa mengikuti arus perbedaan, sehingga masih sering disaksikan bentrokan antar massa pendukung partai politik ketika menjelang pemilu dan pada saat pemilu. Memang saat-saat tersebut sangat sensitif terjadi gesekan-gesekan yang tidak sehat. Ironisnya sebab-sebab terjadinya bentrokan atau gesekan tersebut karena persoalan-persoalan kecil. Di samping itu memaksa seseorang

untuk mengikuti kemauan atau kehendak dalam menentukan sikap politik tertentu, apalagi dengan cara politik uang (*money politic*) juga merupakan bagian dari sisi ekstrem pluralitas. Dengan pemahaman pluralitas yang tepat, tidak perlu seseorang membenci, mengintimidasi, apalagi memusuhi orang lain karena berbeda gambar dan pilihan politiknya.

Dalam kaitan ini menurut Abd A'la (2005), keberhasilan dalam penciptaan kondisi yang kondusif itu merupakan keberhasilan umat Islam pluralis dalam merajut masa depan yang cerah, damai, dan sejahtera. Demikian pula kegagalan dalam menata persoalan itu adalah sebuah awal dari masa depan yang buram. Kondisi seperti ini akan membuat segalanya menjadi mungkin, dan dari segala kemungkinan itu, kekerasan atas nama agama, eksplisit atau implisit akan berpeluang besar untuk menjadi fenomena yang cukup dominan. Dalam kaitan dengan penyikapan terhadap kondisi yang demikian menurut pendapat Azyumardi Azra (2005) perlu dikembangkan sikap inklusif, toleran, dan respek terhadap pluralitas. Hal ini dimaksudkan agar terwujud kehidupan yang aman dan damai.

Selanjutnya, pluralitas dalam konteks agama ibarat sebuah taman yang di dalamnya terdapat aneka ragam bunga yang berwarna-warni. Juga ibarat sebuah aquarium yang di dalamnya terdapat ikan yang beraneka ragam jenis dan warnanya. Indah sekali dipandang. Pluralitas semacam itu menggambarkan keindahan dan keharmonisan di dalam perbedaan. Hal tersebut merupakan gambaran masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, baik dari sisi suku, agama, ras,

budaya maupun pandangan politiknya.

Mengembangkan Sikap Beragama yang Moderat dan Toleran dalam Konteks Sosial-Budaya

Menurut Agus Widjojo, Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat mengancam bentuk negara kesatuan. Potensi itu antara lain faktor geografi, heterogenitas etnis, agama dan kultur, kesenjangan ekonomi dan sosial yang amat besar, pertikaian politik ideologis serta fragmentasi dikhotomis. Bangsa Indonesia memang telah berhasil melampaui satu tahapan kritis, di mana suku dan agama yang pernah menjadi isu sentral dalam pertentangan politik pada masa lalu, tidak lagi menjadi kendala bagi integrasi bangsa. Sayangnya, justru akhir-akhir ini kedua isu itu dimunculkan kembali, bahkan makin marak serta menjadi agenda sentral yang telah berhasil dikemas untuk mengancam kesatuan bangsa.

Realitas yang demikian merupakan tantangan bagi kita sebagai bangsa Indonesia dewasa ini, betapa beratnya tantangan mengelola kemajemukan bangsa dalam berbagai aspeknya. Namun demikian untuk mewujudkan keharmonisan dalam konteks sosial-budaya, bangsa ini memiliki warisan tradisi yang ampuh dari para pendahulu bangsa yang oleh Mahmudah Nur (Peneliti Balitbang Kemenag RI 2016), dikatakan bahwa tradisi-tradisi di Nusantara selalu mengandung aspek spiritual. Ada nilai-nilai keagamaan di balik kebudayaan. Kebudayaanpun dilihat sebagai nilai keagamaan. Oleh karena itu dalam kaitan ini Agus Iswanto (Peneliti Balitbang Kemenag RI 2016), mengatakan bahwa masyarakat sangat diharapkan mampu menjaga

tradisi dan sadar bahwa ada nilai-nilai yang harus dijaga. Hal ini merupakan bagian dari strategi kampanye Islam yang terdapat di Nusantara. Hal ini juga bagian dari upaya menangkal radikalisme dan mendorong pemahan agama yang moderat.

Sementara itu menurut Nur Syam, negara membutuhkan agama sebagai dasar pijak etikanya, dan agama membutuhkan pemerintah untuk mengatur kehidupan umat beragama...*truth claimed* yang egoistik akan dapat menjadi pemicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Di sinilah arti penting mengerem ego-religius agar tidak berkecenderungan untuk menihilkan agama-agama yang dipeluk oleh umat manusia lainnya. Agama selalu mengajarkan akan kasih sayang dan kedamaian. Islam mengajarkan agama yang rahman dan rahim. Kristiani mengajarkan agama kasih, Konghucu mengajarkan kebajikan, Budha mengajarkan kesederhanaan, Hindu mengajarkan kesempurnaan. Semua ini adalah ajaran agama yang menghendaki adanya keselarasan dan keserasian hidup, harmoni, dan kerukunan dalam kehidupan.

Menurut M.Mas'ud Said dalam bahasa agama, kesetiakawanan sosial sangat dekat dengan *ukhuwah ijtimaiyah* atau *al-takaful al ijtimaiyah* (yang berarti persaudaraan yang harmonis dalam masyarakat). Nilai ini (telah lama) menjadi nilai dasar pendidikan pesantren salaf. Dalam istilah pemerintahan modern sikap itu kemudian dipromosikan sebagai *social responsibility* yang akhir-akhir ini dipercaya sebagai obat mujarab untuk mengatasi ketidakberdayaan sosial. Di Nusantara, kesetiakawanan sosial itu sangat terbina sebagai kearifan sosial (*local wisdom*) yang dicontohkan dan dipertahankan

secara komunal oleh pemimpin informal di negeri ini.

Dalam kaitan ini contohnya secara *policy*, Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Jatim) telah membangun harmoni sosial di Wilayah Jatim dengan strategi (1) memfasilitasi layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah, (2) meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial dan ekonomi, dan (3) meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan.

Simpulan

Dalam konteks sosial-budaya, pengembangan sikap beragama yang moderat dan toleran sangat diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih damai dan bermartabat dengan cara melestarikan tradisi-tradisi Nusantara yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa.

Di samping itu pemahaman pluralitas yang tepat juga diharapkan dapat memberikan pencerahan yang positif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan, akan tetapi merupakan suatu kekayaan dan kenyataan yang harus dijunjung tinggi karena perbedaan merupakan *sunnatullah* yang telah dititahkan oleh Allah bagi alam semesta. Demikian pula perbedaan keyakinan agama dan partai politik tidak perlu menjadi sesuatu yang dihadapi-hadapkan akan tetapi sesuatu yang beragam yang perlu dijaga dalam koridor bingkai persatuan dan kesatuan.

Daftar Pustaka

- A'la, Abd, dkk. 2005. *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam*. Bandung : Nuansa
- Azra, Azyumardi. 2005. *Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia*. Jakarta : Jurnal Analisis CSIS Vol. 34, No. 1.
- Imarah, Muhammad. 1999. *Islam dan Pluralitas (Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan)*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Iswanto, Agus (Peneliti Litbang Kemenag RI). "Gali Nilai-nilai Kerukunan" (Kompas, 05/02/2016).
- Nur, Mahmudah (Peneliti Litbang Kemenag RI). "Gali Nilai-nilai Kerukunan" (Kompas, 05/02/2016).
- Pemerintah Propinsi Jatim, 2015. *Kebijakan Membangun Harmoni Sosial di Jatim*.
- Syam, Nur. "Meneguhkan Peran Pemerintah dalam Membumikan Agama sebagai Acuan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" (Makalah). Disampaikan dalam Seminar Nasional di Unair Surabaya tanggal 19 November 2015.
- Said, M. Mas'ud. "Sinergi untuk Membangun Indonesia Berbasis Nilai Agama" (Makalah). Disampaikan dalam Seminar Nasional di Unair Surabaya tanggal 19 November 2015.
- Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif (Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama)*. Bandung : Mizan.
- Widjojo, Agus, dkk. 2000. *Menyelamatkan Masa Depan Indonesia*. Jakarta : Harian Kompas
- Yani, Muhammad Turhan. 2006. *Perbincangan Seputar Sosial-Politik dan Pemikiran Keagamaan*. Unesa University Press.